

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025

**# KOLABORASI
MEDAN BERKAH**



INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan 20112

Web : inspektorat.pemkomedan.go.id

Email : inspektorat@pemkomedan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat selama kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Rencana Kerja Tahun 2025 dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat. Besar harapan kami agar Renja ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat kota Medan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua *stakeholder*.

Medan, Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur,

Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196906101997031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	17
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	31
BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB.V. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023.....	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra s.d. Tahun 2024.....	8
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	15
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	20
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 2021-2026	29
Tabel 3.2	Rumusan Tujuan, Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat yang akan dicapai dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.....	30
Tabel 3.3	Target Kinerja Inspektorat Tahun 2024 dan 2025	20
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Medan.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi e-musrenbang27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah, Inspektorat Kota Medan juga menyusun Renja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Lima Tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 138 dan 139, Inspektorat sebagai salah satu perangkat daerah yang harus menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mempertajam program, kegiatan, subkegiatan dan pagu indikatif yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan untuk diverifikasi.

Renja Inspektorat Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. Renja ini juga memperhatikan hasil evaluasi renja tahun lalu dan isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antarsektor pembangunan, koordinasi antar-perangkat daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi terkait lainnya.

Renja Inspektorat Tahun 2025 selain menjadi penjabaran Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 yang didalamnya memuat visi yang telah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”** dengan misi sebagai berikut:

Misi Medan Bersih, misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Kota Medan merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih. Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang mengarah pada upaya menyelenggarakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Renja ini berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri maupun Kebijakan Pemerintah Kota Medan. Renja disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;

10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Piagam pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan.;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 dimaksud untuk menghasilkan rumusan rencana kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mending terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Rencana Kerja Inspektorat disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, pencapaian target Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun anggaran 2023.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra dan capaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berikut hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Inspektorat menetapkan 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai. Capaian target kinerja tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	100%
	Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI	5%	-46,15%	0%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	78%	78%	100%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	17,00	15,91	93,58%
Meningkatnya penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
Rata-rata capaian kinerja				78,71

Berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja Perjanjian Kinerja sebesar 78,71%, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah Sesuai.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat tersinergi dan terkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Artinya, seluruh kegiatan memiliki keterkaitan antartarget, baik langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berbandung lurus dengan tingkat capaian setiap target dalam perjanjian kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat dan capaian renstra Inspektorat s.d. tahun 2024 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah									
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	16	1	6	5	83,3%	5	11	68,8%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	90	80	80	80	100,0%	90	80	88,9%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	12	3	3	3	100,0%	3	9	75,0%
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	90	90	110	110	100,0%	90	90	100,0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1098	0	130	130	100,0%	650	780	71,0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1334	260	186	186	100,0%	800	1.246	93,4%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah									
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,0%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	16	6	6	6	100,0%	3	15	93,8%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	0	1	1	100,0%	2	3	60,0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	32	1	4	4	100,0%	12	17	53,1%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	1	2	2	100,0%	4	7	58,3%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	4	4	4	100,0%	12	20	62,5%
Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	paket	3	0	1	-	0,0%	1	1	33,3%

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	90	2	4	4	100,0%	78	84	93,3%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,0%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,0%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	10	14	14	100,0%	10	14	100,0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	152	150	152	152	100,0%	152	152	100,0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal									
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kegiatan Pengawasan Internal yang dilaksanakan									
8.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	200	84	76	73	96,1%	48	205	102,5%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	268	59	70	70	100,0%	72	201	75,0%

	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	2	1	2	-	0,0%	1	2	100,0%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	216	57	57	57	100,0%	51	165	76,4%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,0%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	60	24	24	20	83,3%	12	56	93,3%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan internal dengan tujuan tertentu									
9.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	3	0	1	-	0,0%	1	1	33,3%
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	264	70	70	70	100,0%	70	210	79,5%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi									
10.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan									
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	17	1	8	2	25,0%	4	7	41,2%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,0%
11.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi									
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	50	56	50	50	100,0%	50	50	100,0%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	50	56	50	10	20,0%	50	50	100,0%

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	14	3	3	3	100,0%	4	10	71,4%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	50	21	50	50	100,0%	50	50	100,0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian dan proyeksi kinerja pelayanan Inspektorat Kota Medan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No.	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1.	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	-	-	66%	78%	78%	78%	78%	70%	78%	78%	78%	

3.	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	-	-	15,55	17	17,5	18	18,5	15,55	15,91	17,5	18	
4	Level Maturitas SPIP	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Pemko Medan mengambil kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun substansi dari Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program. Dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, diharapkan akan terwujud sinergi antarpelaku pembangunan, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan Kota dengan Provinsi dan Pusat, serta diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Medan, Inspektorat juga menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan melakukan Perubahan Renstra untuk mengakomodir perkembangan keadaan, khususnya yang terkait dengan urusan pengawasan. Adapun permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan, antara lain:

1. rendahnya jumlah dan kompetensi APIP, sedangkan *mandatory audit* terlalu banyak sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi;

2. belum berjalannya manajemen risiko dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan audit/reviu/evaluasi ataupun pengawasan lainnya; dan
3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur.

Isu strategis yang patut diangkat dalam Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah reformasi birokrasi pemerintah dan penguatan SDM Aparatur. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM Aparatur. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Hal ini tentunya harus didukung dengan penguatan SDM Aparatur, baik finansial maupun mental.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Medan, masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan kota yang telah dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 Nomor B/868/AA.05/2022, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemko Medan Tahun 2022 untuk Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan Pemko Medan telah melakukan evaluasi AKIP hingga ke Tingkat PD serta menyusun kertas kerja evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah

- hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada level pusat; dan
- laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Pemko Medan melalui Inspektorat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah berdasarkan pagu indikatif dan analisis kebutuhan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					-
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	70.491.080	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6.500.000	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	18.887.341.200	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	20.852.678.512	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	291.150.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	100.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	3.700.479.460	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	2.362.510.460	-

3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	318 orang	672.990.400	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	318 orang	197.763.240	-
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348 orang	1.424.034.480	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348 orang	334.863.240	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.344.810	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.736.040	-
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	350.079.050	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	18.000.000	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	159.511.550	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	73.741.870	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	248.738.595	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.417.603	-

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	72.219.300	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	50.438.500	-
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	273.380.029	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	213.236.979	-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.054.744.500	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	595.692.600	-
8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	410.700.000	8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	151.700.000	-
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-
1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	156.837.000	1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	144.837.000	-
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.781.250	1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.781.250	-

2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	699.625.140	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	619.085.140	-
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	122.156.160	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.180.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	241.000.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	241.000.000	-
3	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Medan	Jumlah mebel yang dipelihara	90 unit	15.750.000							
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151 unit	115.100.000	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151 unit	115.100.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	114.500.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	91.600.000	-

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
H	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					H	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					-
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 laporan	618.000.000	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 laporan	450.600.000	-
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	76 laporan	1.161.200.000	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	76 laporan	662.800.000	-
3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	12.950.000	3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	12.950.000	-
4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	51 laporan	370.750.000	4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	51 laporan	272.050.000	-
5	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	310.800.000	5	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	83.400.000	

6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	691.983.080	6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	273.000.000	-
1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					-
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	11.700.000	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	300.000	-
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 laporan	1.122.900.000	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 laporan	650.700.000	-
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					-
J	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					J	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					-
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 rekomendasi	86.700.000	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 rekomendasi	21.600.000	-

2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 rekomednasi	86.700.000	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 rekomednasi	21.600.000	-
K	Pendampingan dan Asistensi					K	Pendampingan dan Asistensi					
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 perangkat daerah	715.146.160	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 perangkat daerah	206.000.000	-
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 perangkat daerah	40.000.000	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 perangkat daerah	20.000.000	-
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	310.504.820	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	68.400.000	-
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	383.354.000	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	77.000.000	-
Jumlah					35.017.642.064	Jumlah					29.258.262.434	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat selama ini didasarkan pada tugas dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. Namun demikian, isu-isu strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan data Aplikasi e-Musrenbang per Februari 2024 seperti digambarkan pada Gambar 2.1, belum ada usulan terkait Perencanaan 2025 yang masuk ke Inspektorat.

Gambar 2.1
Aplikasi e-musrenbang



Selanjutnya Inspektorat Kota Medan juga tidak ada menerima usulan program dan kegiatan yang disampaikan secara langsung oleh para pemangku kepentingan untuk tahun 2025.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun yang mengatur tentang fokus pembinaan dan pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan risiko sebagai berikut.

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemeriksaan kinerja terhadap program, kegiatan, subkegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Reviu laporan keuangan; dan
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Medan dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan selama Tahun 2021–2026, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Meningkatnya penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Meningkatnya nilai SAKIP Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Medan sebagaimana tertera didalam tabel 3.1, maka Inspektorat Kota Medan merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Medan yaitu dengan merumuskan:

Tabel 3.2

Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat yang akan dicapai dalam rangka Pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kota Medan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan
			Persentase penyelesaian tindaklanjut Injut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal
		Meningkatnya penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP
		Meningkatnya nilai SAKIP Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Kinerja Inspektorat Tahun 2024 dan 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	2024	2025
Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP
	Persentase penyelesaian tindaklanjut Injut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	78%	78%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	17,50	18,00
Meningkatnya penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
Meningkatnya nilai SAKIP Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian indikator tujuan dan sasaran, maka pada Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Medan merencanakan akan melaksanakan 3 program, 11 kegiatan, dan 35 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp29.258.262.434,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Medan selama lima tahun kedepan Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Medan dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Inspektorat merumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 serta prakiran maju tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Medan	5 dokumen	6.500.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	6 dokumen	70.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	90 Orang/Bulan	20.852.678.512	APBD Kota Medan	Lanjutan	90 Orang/Bulan	21.905.771.852

6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Inspektorat Kota Medan	3 paket	100.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	3 paket	400.000.000
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Kota Medan	90 orang	2.362.510.460	APBD Kota Medan	Lanjutan	90 orang	3.500.000.000
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	318 orang	197.763.240	APBD Kota Medan	Lanjutan	650 orang	550.000.000
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	348 orang	334.863.240	APBD Kota Medan	Lanjutan	800 orang	908.744.268

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	1 paket	5.736.040	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 paket	12.000.000
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	1 paket	18.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	4 Paket	320.000.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	2 paket	73.741.870	APBD Kota Medan	Lanjutan	2 paket	120.000.000
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	12 Paket	215.417.603	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Paket	350.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	4 paket	50.438.500	APBD Kota Medan	Lanjutan	4 paket	80.000.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	213.236.979	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	500.000.000

6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	595.692.600	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	850.000.000
6.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Kota Medan	1 dokumen	151.700.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 dokumen	500.000.000
6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	6 unit	144.837.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Unit	300.000.000
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	5.781.250	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	9.000.000

6.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	619.085.140	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	750.000.000
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Kota Medan	1 Unit	42.180.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Unit	104.516.000
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Kota Medan	14 unit	241.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	14 unit	300.000.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Kota Medan	151 unit	115.100.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	151 unit	127.100.000

6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Kota Medan	1 unit	91.600.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 unit	120.000.000
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	52 laporan	450.600.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	60 laporan	600.000.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	76 laporan	662.800.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	90 laporan	1.135.940.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Medan	1 laporan	12.950.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 laporan	17.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Medan	51 laporan	272.050.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	51 laporan	500.000.000

6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat Kota Medan	1 kesepakatan	83.400.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 kesepakatan	365.000.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Medan	12 dokumen	273.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 dokumen	697.426.507
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Inspektorat Kota Medan	1 laporan	300.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 laporan	15.000.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Medan	54 laporan	650.700.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	70 laporan	975.000.000

6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Kota Medan	4 rekomendasi	21.600.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	4 rekomendasi	100.000.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Kota Medan	1 rekomendasi	21.600.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 rekomendasi	100.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi								
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Medan	50 perangkat daerah	206.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 perangkat daerah	671.409.844

6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Medan	50 perangkat daerah	20.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 perangkat daerah	60.000.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Medan	4 kegiatan	68.400.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	4 kegiatan	506.908.012
6.01.03.2.02.0003	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Medan	50 perangkat daerah	77.000.000	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 perangkat daerah	497.450.000
Jumlah					29.258.262.434				38.018.266.483

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan kerja Inspektorat Kota Medan dalam satu tahun. Renja Inspektorat Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dan memperkecil risiko yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada Tahun 2025.

Renja ini menyajikan target kinerja Inspektorat Kota Medan dan rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2025. Selain itu, Renja ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan tolak ukur tingkat keberhasilan tahunan Inspektorat Tahun 2025 yang tertuang dalam bentuk laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025 dalam menjalankan fungsi pengawalan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih.

Selanjutnya, besar harapan kami pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 ini akan terlaksana dengan baik melalui dukungan dan Kerjasama semua pihak demi terwujudnya pengelolaan keuangan Kota Medan yang akuntabel dalam kerangka *good governance*.